



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan antara *agen* dan *principal*. Keduanya terikat dalam sebuah kontrak yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas sehingga agen diharapkan melakukan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Di sisi lain, *principal* akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal (Kurniawan dan Yuniarto, 2016). *Principal* sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada *agen* sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi dan hasil pengolahan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi *principal* (Praptika dan Rasmini, 2016).

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi *agency theory* adalah *audit delay*. *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi berkurang (Praptika dan Rasmini, 2016). Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada *principal* menimbulkan asimetris informasi. Dalam hal ini pihak *agen* mengetahui lebih banyak informasi internal perusahaan secara *detail* dibandingkan pihak *principal* yang mengetahui informasi perusahaan secara

eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak *agen* atau manajemen dan pihak *principal* atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada *principal* (Praptika dan Rasmini, 2016).

Auditor merupakan pihak yang diyakini mampu menjembatani kepentingan antara pihak *principal* dan *agen* dalam mengelola keuangan perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan *principal* dan dapat meyakinkan *principal* bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas (Kowanda *et al.*, 2016).

2.2 Perusahaan Go Public

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) *go public* adalah perusahaan tertutup yang memiliki kesempatan menjadi perusahaan publik dengan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkannya di PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id, 2016). Manfaat yang diterima dari *go public* (www.idx.go.id, 2016):

1. Memperoleh sumber pendanaan baru

Perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan baru dengan cara:

- a. Perolehan dana melalui hasil penjualan sebagian saham kepada publik melalui penawaran umum perdana saham.

Dengan cara ini perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah besar sekaligus dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah dari perbankan.

b. Mempermudah akses kepada perbankan

Dengan menjadi perusahaan publik, pihak perbankan akan lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan karena perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui keterbukaan informasi yang diumumkan melalui bursa.

c. Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang.

Calon investor akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang sudah menjadi perusahaan *go public*.

2. Memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha

Keunggulan kompetitif yang didapatkan, yaitu:

a. Perusahaan berkesempatan mengajak partner kerja, seperti pemasok (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) untuk menjadi pemegang saham.

b. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja operasional, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada *stakeholder*, sistem pelaporan dan aspek pengawasan.

3. Melakukan *merger* atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham

Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian pembiayaan *merger* dapat lebih mudah dilakukan, yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan *merger*.

4. Peningkatan kemampuan *going concern*

Kemampuan *going concern* adalah kemampuan untuk dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara pemegang saham pendiri, atau adanya perubahan dinamika pasar yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan di bidang usahanya. Contoh kemampuan bertahan perusahaan:

- a. Perpecahan diantara pemegang saham pendiri

Setiap saat pihak pendiri dapat menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya di bursa tanpa harus perusahaan dilikuidasi terlebih dahulu.

- b. Kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga

Perusahaan dapat mengkonversi utang menjadi saham dimana saham tersebut dapat dijual kepada publik di bursa.

5. Meningkatkan citra perusahaan (*company image*)

Perusahaan akan selalu menjadi perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga meningkatkan citra perusahaan.

6. Meningkatkan nilai perusahaan (*company value*)

Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, sehingga akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Konsekuensi yang harus dihadapi perusahaan yang melakukan *go public* (www.idx.go.id,2016):

1. Bagi kepemilikan

Persentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang khawatir akan kehilangan kontrol perusahaan. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena terdapat jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik sehingga tidak akan mempengaruhi kendali pemegang saham pendiri.

2. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku

Syarat perusahaan untuk menjadi *go public* (www.idx.go.id, 2016), yaitu pencatatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu papan utama dan papan pengembang. Papan utama ditujukan untuk perusahaan besar dan telah memiliki *track record*. Papan pengembang ditujukan bagi perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan papan utama, seperti perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan perusahaan yang sedang dalam penyehatan.

Tabel 2. 1
Persyaratan Perusahaan Terdaftar di BEI

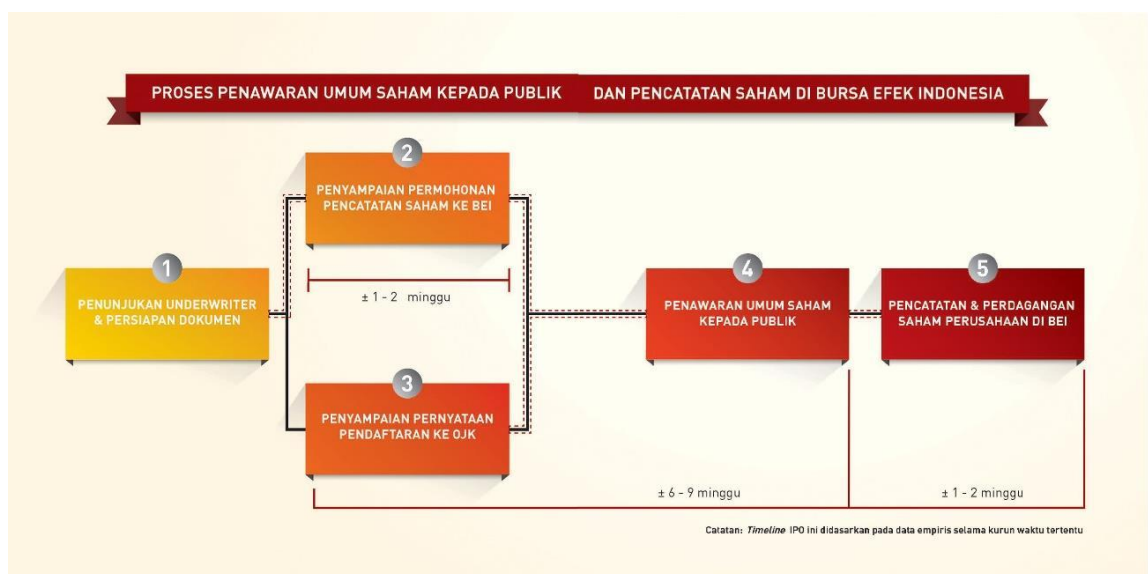
Papan Utama	Papan Pengembang
Operasional pada <i>core business</i> yang sama \geq 36 bulan	Operasional pada <i>core business</i> yang sama \geq 12 bulan
Membukukan laba perusahaan 1 tahun buku terakhir	Tidak diharuskan, namun membukukan keuntungan jika pada tahun ke-2 telah memperoleh laba
Laporan keuangan auditan \geq 3 tahun	Laporan keuangan auditan \geq 12 bulan
Opini WTP (2 tahun terakhir)	Opini WTP
Aktiva berwujud bersih \geq 100 miliar Rupiah	Aktiva berwujud bersih \geq 5 miliar Rupiah
Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar • 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun 	Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> • 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar • 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun

<ul style="list-style-type: none"> • 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun 	<ul style="list-style-type: none"> • 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
Jumlah Pemegang Saham > 1000 pihak	Jumlah Pemegang Saham > 500 pihak

Sumber: www.idx.go.id (2016)

Gambar 2. 1

Proses Penawaran Saham Kepada Publik



Sumber: www.idx.go.id (2016)

Proses penawaran saham kepada publik, yaitu:

1. Penunjukkan *underwriter* dan persiapan dokumen

Underwriter adalah penjamin emisi efek yang membantu menawarkan saham kepada investor. Perusahaan membentuk tim internal, menunjuk *underwriter* dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan *go public* serta mempersiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Dokumen dan profesi yang dibutuhkan adalah:

- a. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
 - b. Anggaran dasar berikut amandemennya yang disiapkan Notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang
 - c. Legal Audit dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - d. Laporan Penilaian dari Penilai Independen yang terdaftar di OJK, jika ada
 - e. Prospektus Penawaran Umum
2. Penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI dan penyampaian pendaftaran ke OJK

Perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, dan proyeksi keuangan. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang wajar, teratur, dan efisien.

3. Penawaran umum saham kepada publik

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor

setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI

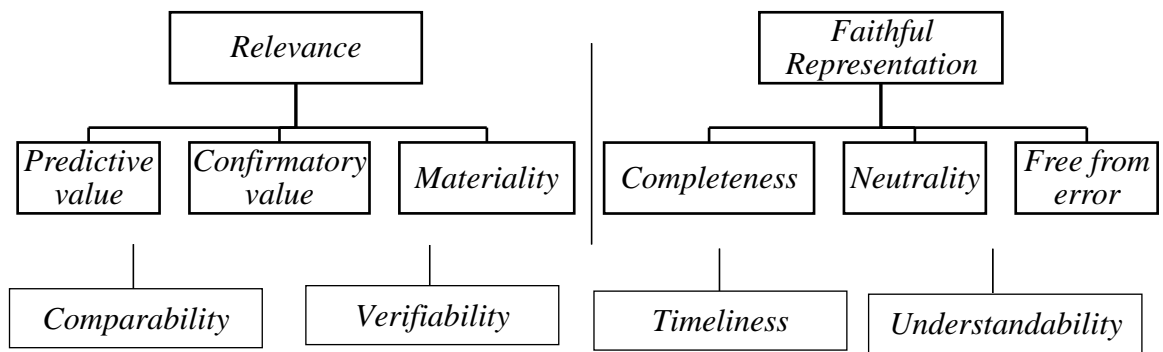
4. Pencatatan dan perdagangan saham di BEI
 - a. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan.
 - b. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa
 - c. Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui *broker* atau Perusahaan Efek yang menjadi anggota bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Gambar 2. 2

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan



Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Menurut Kieso *et al.* (2018) karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu *fundamental quality* dan *enchancing quality*. Suatu informasi dikatakan memenuhi *fundamental quality* jika:

1. Relevan (*Relevance*)

Informasi dikatakan relevan jika informasi keuangan tersebut mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat membuat perbedaan jika memiliki:

a. *Predictive value*

Informasi tersebut memiliki nilai yang digunakan oleh investor untuk memprediksi masa depan.

b. *Confirmatory value*

Informasi yang membantu pengguna mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi awal.

c. *Materiality*

Informasi dikatakan material jika salah saji dapat mempengaruhi keputusan pengguna.

2. Penyajian Jujur (*Faithful Representation*)

Informasi dikatakan *faithful representation* jika angka dan deskripsi sesuai dengan yang benar-benar terjadi

- a. *Completeness*, angka-angka dan deskripsi pada informasi keuangan sesuai dengan apa yang terjadi.
- b. *Neutrality*, perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk keuntungan pihak tertentu.
- c. *Free from error*, informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat.

Enhancing qualities digunakan untuk membedakan antara informasi yang lebih berguna dan informasi yang kurang berguna. Informasi dikatakan memenuhi *enhancing qualities* jika:

1. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Membandingkan informasi yang diukur dan dilaporkan dalam perlakuan yang sama untuk perusahaan yang berbeda.

2. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Terjadi ketika pihak independen mengukur menggunakan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang sama.

3. Tepat Waktu (*Timeliness*)

Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

4. Dapat dimengerti (*Understandability*)

Bagaimana pengambil keputusan membuat keputusan dan kemampuan untuk memproses informasi yang dimiliki dan didapatkan dari sumber lain.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1, terdapat enam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan keuangan terdiri dari tiga kategori, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, aset didefinisikan sebagai sumber daya akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Sementara liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik dan ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

Laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan beban. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan mendefinisikan penghasilan (*income*) sebagai kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan

beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas mempresentasikan perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik yang menunjukkan kontribusi dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan atas entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya

Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mekasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Menurut Hery (2019) pengguna informasi akuntansi dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Berikut yang termasuk pemakai internal, antara lain (Hery, 2019):

1. Direktur dan manager keuangan

Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur maka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh tempo pinjaman.

2. Direktur operasional dan manager pemasaran

Untuk menentukan efektif dan tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan maka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan.

3. Manager dan *supervisor* produksi

Membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual per unit.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemakai eksternal antara lain:

1. Investor

Menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya.

2. Kreditur

Menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang.

3. Pemerintah

Menggunakan informasi akuntansi dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara.

4. Ekonom, praktisi dan analis

Menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional.

2.4 Audit

Menurut Arens *et al.* (2017) audit adalah proses akumulasi data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2013) dalam Standar Audit (SA) 200 tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut Arens *et al.* (2017) terdapat 3 jenis audit:

1. Audit operasional (*Operational audit*)

Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas pada prosedur dan metode yang digunakan dalam operasi perusahaan.

2. Audit kepatuhan (*Compliance audit*)

Menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur, peraturan yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3. Audit laporan keuangan (*Financial statement audit*)

Menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria.

Sesuatu dianggap material apabila dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Terdapat tiga tingkatan materialitas (Hery, 2019)

1. Jumlahnya tidak material

Apabila terdapat salah saji dalam laporan keuangan, namun cenderung tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan, maka salah saji tersebut dianggap tidak material

2. Jumlahnya material

Apabila salah saji dalam laporan keuangan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan tersebut, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan masih bermanfaat bagi penggunaannya.

3. Jumlahnya sangat material

Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Hery (2019) tujuan audit terkait dengan transaksi:

1. Keterjadian, berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang telah dicatat memang benar-benar terjadi.
2. Kelengkapan, berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat
3. Keakuratan, berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar.

4. Pemindahbukuan dan Pengikhtisaran, berkaitan dengan berkaitan dengan keakuratan pemindahan informasi dari jurnal ke buku besar dan neraca saldo serta pengikhtisaran transaksi dalam laporan keuangan.
5. Klasifikasi, berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada akun yang tepat.
6. Penepatan waktu, berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat

Auditor biasanya akan mengikuti suatu proses audit untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi dan tepat serta semua tujuan audit sudah ditetapkan dan dipenuhi. Proses audit terdiri dari empat fase (Hery, 2019):

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Perolehan bukti audit yang cukup dan pengendalian atas biaya audit memerlukan perencanaan yang matang, sehingga auditor perlu:

- a. Memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan klien

Auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan terkait. Contoh klien bergerak di industri pertambangan maka auditor harus memahami bagaimana menghitung kandungan yang terdapat dalam batu bara.

- b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian

Risiko salah saji dapat diminimalisir apabila klien memiliki pengendalian internal yang efektif. Pengumpulan bahan bukti audit lebih ditekankan atau difokuskan pada area di mana pengendalian internal dianggap tidak efektif.

c. Menilai risiko salah saji material

Auditor menggunakan pemahamannya atas industri serta keefektifan pengendalian internal untuk menilai risiko saji yang material dalam laporan keuangan klien.

2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi

a. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilakukan auditor untuk menentukan efektifitas rancangan dan penerapan pengendalian internal klien. Pengujian pengendalian dapat memberikan bukti tentang apakah kebijakan dan prosedur pengendalian telah diterapkan secara konsisten.

b. Pengujian substantif adalah evaluasi auditor tentang pencatatan transaksi dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi. Tujuan uji substantif adalah mengungkapkan kekeliruan dalam pencatatan.

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo

a. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan menilai apakah saldo akun tampak wajar.

b. Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur audit yang dilakukan auditor untuk menguji salah saji moneter atas saldo akhir akun dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah menyelesaikan prosedur audit, auditor harus menggabungkan informasi untuk mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

Menurut Arens *et al.* (2017) risiko audit terdiri dari 4 komponen, yaitu:

1. Risiko deteksi terencana

Adalah risiko bukti audit untuk suatu tujuan audit gagal mendeteksi salah saji yang melebihi kinerja materialitas. Risiko deteksi terencana menentukan jumlah bukti substantif yang auditor rencanakan untuk diakumulasi.

2. Risiko inheren

Penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material, sebelum melakukan efektivitas dari pengendalian internal yang terkait.

3. Risiko Pengendalian

Mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa suatu salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien

4. Risiko Audit

Pengukuran atas kesediaan auditor menerima kemungkinan bahwa terdapat salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit telah diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan.

Menurut Arens *et al.* (2017) sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

Untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Untuk memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Organisasi diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan baik yang berhubungan dengan akuntansi maupun secara tidak langsung berhubungan dengan akuntansi. Contohnya UU perlindungan lingkungan dan hak sipil dan peraturan pajak penghasilan.

Menurut Arens *et al.* (2017) terdapat lima komponen pengendalian internal yang dikeluarkan oleh *COSO*, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting, yaitu:

a. Integritas dan nilai-nilai etis (*Integrity and ethical values*)

adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan atau godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis dan juga meliputi mengkomunikasikan nilai-nilai

entitas dan standar perilaku kepada para karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode perilaku, dan teladan.

b. Komitmen pada kompetensi

Komitmen pada kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

Meskipun mendelegasikan tanggung jawabnya atas pengendalian internal kepada manajemen, dewan harus secara teratur menilai pengendalian tersebut, dewan yang aktif dan objektif seringkali juga dapat mengurangi kemungkinan bahwa manajemen mengesampingkan pengendalian yang ada. Untuk membantunya melakukan pengawasan, dewan membentuk komite audit untuk mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit bertanggungjawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Memahami aspek-aspek dalam filosofi dan gaya operasi manajemen akan membuat auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.

e. Struktur organisasi

Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karena pentingnya personil yang kompeten dan terpercaya mengadakan pengendalian yang efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada personil itu merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal.

2. Penilaian risiko

Auditor akan memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko oleh manajemen dengan memanfaatkan kuesioner dan diskusi dengan manajemen untuk menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko itu, serta memutuskan tindakan apa yang diperlukan untuk menangani risiko itu

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas. Terdiri dari lima bagian, yaitu

a. Pemisahan tugas yang memadai

Mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan yang terutama penting bagi auditor. Pemisahan tugas ini tergantung pada ukuran organisasi/perusahaan.

Contohnya Pemisahan penyimpanan aktiva dari akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aktiva terkait, pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, pemisahan tugas TI dari departemen pemakai.

b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas

Setiap transaksi harus disahkan dengan benar baik untuk transaksi umum atau transaksi khusus. Contohnya, otorisasi umum manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasi dan otorisasi khusus manajemen menetapkan kebijakan kasus per kasus.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

Untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa semua aset dikendalikan dengan baik dan semua transaksi dicatat dengan tepat. Kriteria rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang sesuai, harus: bernomor urut, disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau segera sesudah itu, cukup sederhana dan dapat dipahami, dirancang untuk berbagai penggunaan.

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, penggunaan pencegahan fisik.

Contohnya penggunaan gudang persediaan untuk menjaga terhadap pencurian.

e. Pemeriksaan independen atas kinerja, verifikasi internal atau pemeriksaan independen.

4. Informasi dan komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan

entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan kelas transaksi utama entitas, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti.

5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Menurut Hery (2019) keandalan bukti audit sangat tergantung pada:

1. Independensi penyedia bukti

Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak di luar klien lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang berasal dari atau dibuat oleh klien sendiri.

2. Efektifitas pengendalian internal klien

Bukti audit lebih dapat diandalkan jika pengendalian internal diterapkan secara efektif oleh klien.

3. Perolehan secara langsung oleh auditor

Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, penghitungan ulang dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan.

4. Kualifikasi penyedia informasi dan juga auditor

Meskipun penyedia informasi adalah pihak yang independen namun bukti audit akan tidak dapat diandalkan jika informasi tersebut tidak memiliki pemahaman mengenai arti pentingnya bukti tersebut. Contoh, hasil komunikasi dengan advokat (secara profesional) akan lebih dipercaya dibandingkan konfirmasi dari pelanggan.

5. Objektivitas

Bukti objektif lebih dapat diandalkan dibanding dengan bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu. Contohnya, hasil konfirmasi di bank, pemeriksaan fisik atas saldo kas kecil, persediaan, serta bukti pembelian.

6. Ketepatan waktu

Berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan serta bagaimana menentukan tanggal sampel. Untuk akun dalam laporan posisi keuangan ketepatan waktu berkaitan dengan kapan bukti tersebut dikumpulkan, sedangkan untuk akun dalam laporan laba rugi ketepatan waktu berkaitan dengan penentuan periode yang akan diaudit.

Menurut Hery (2019) dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan terdapat delapan jenis bukti audit:

1. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik adalah cara objektif untuk mengetahui kuantitas maupun deskripsi aset. Pemeriksaan fisik merupakan cara langsung untuk memverifikasi apakah aset tersebut benar ada dan telah dicatat.

2. Konfirmasi

Adalah proses untuk mendapatkan respon (tertulis dan lisan) dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu berkaitan dengan arsensi manajemen dan tujuan audit.

3. Dokumentasi

Adalah pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan.

4. Prosedur analitis

Menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar atau rasional.

5. Wawancara dengan klien

Merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai bentuk respon atas pertanyaan yang diajukan auditor.

6. Penghitungan ulang

Melibatkan pengecekan ulang atas sampel hitungan yang telah dilakukan klien.

7. Observasi

Penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien.

Menurut IAPI (2013) dalam SA 700 terdapat 2 bentuk opini audit, yaitu opini tanpa modifikasi dan opinin modifikasi. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasi bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Auditor harus menyatakan opini modifikasi bila berdasarkan bukti audit yang

diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau bila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan.

Menurut IAPI (2013) dalam SA 705 terdapat tiga jenis opini modifikasi, yaitu:

1. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mendasari opini, dan auditor

menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada dapat bersifat material dan pervasif.

2.5 Audit Delay

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya waktu atau hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Menurut Kurniawati *et al.* (2016) terdapat 3 komponen *audit delay*, yaitu:

1. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan auditor.
2. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
3. *Reporting lag* adalah selisih waktu antara penyelesaian pekerjaan lapangan dan tanggal laporan auditor.

Menurut Arens *et al.* (2017) standar laporan audit terdiri dari delapan bagian, yaitu:

1. Judul laporan (*report title*), standar audit menyatakan laporan harus diberikan judul yang mengandung kata “*independent*”. Kewajiban pencantuman kata ini untuk memberi tahu para pemakai laporan bahwa audit yang dilakukan tidak menyimpang.

2. Alamat laporan audit (*audit report address*), laporan biasanya ditujukan untuk perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan.
3. Paragraf pendahuluan (*introductory paragraph*), paragraf pertama yang menunjukkan kantor akuntan publik telah melakukan audit.
4. Tanggung jawab manajemen (*management responsibility*), paragraf menyatakan bahwa laporan ini merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan
5. Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*), paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Paragraf kedua menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ke tiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor
6. Paragraf opini (*opinion paragraph*), paragraf terakhir dalam laporan audit menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit.
7. Nama dan alamat kantor akuntan publik (*name and address of CPA firm*), nama mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit. Kota dan negara bagian lokasi KAP juga harus dicantumkan.
8. Tanggal laporan audit (*audit report date*), tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini penting karena menunjukkan hari

terakhir dari tanggung jawab auditor untuk *me-review* peristiwa yang penting setelah tanggal laporan keuangan.

Perusahaan dapat dikatakan terlambat dalam penyajian laporan keuangan apabila *audit delay* melebihi jangka waktu dari ketentuan yang sudah diberlakukan (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor X.K.2 mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Peraturan OJK mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan auditan dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ke tiga atau setelah 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan nomor: KEP-307/BEJ/07/2004 mengenai sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yaitu:

1. Keterlambatan 1-30 hari = peringatan tertulis I
2. Keterlambatan 31-60 hari = peringatan tertulis II, denda Rp 50.000.000,00
3. Keterlambatan 61-90 hari = peringatan tertulis III, denda Rp 150.000.000,00
4. Keterlambatan > 90 hari = suspensi

Hasil penelitian Suparsada dan Putri (2017) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014 menunjukkan rata-rata *audit delay* sebesar 76,91 hari. Menurut penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI tahun 2010-2012 rata-rata *audit delay* sebesar 78,77 hari. Sedangkan menurut penelitian Setyani (2015) rata-rata *audit delay* adalah sebesar 72,03 hari.

Menurut Agustin *et al.* (2018) *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Menurut Amani (2016) pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik menyebabkan *audit delay* semakin meningkat.

2.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode tertentu (Kieso *et al.*, 2019). Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Suparsada dan Putri, 2017). Rasio profitabilitas terdiri dari (Kieso *et al.*, 2019):

1. Profit margin

Mengukur berapa persentase laba bersih yang diperoleh untuk setiap Rupiah penjualan yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih

2. *Asset turnover*

Mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset

3. *Return on asset*

Mengukur profitabilitas secara keseluruhan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata aset

4. *Return on ordinary shareholder's equity*

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak Rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang saham biasa.

5. *Earning per share*

Mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang biasa beredar.

6. *Price earning ratio*

Mengukur rasio harga pasar masing-masing saham untuk laba per saham. Digunakan oleh investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham.

7. *Payout ratio*

Mengukur persentase pendapatan yang terdistribusi dalam bentuk dividen tunai.

Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.

Pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (Suparsada dan Putri, 2017). Rumus *Return on Asset* (Kieso *et al.*, 2019):

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Asset}}$$

Rumus *Average Total Asset* (Kieso *et al.*, 2019):

$$\text{Average Total Asset} = \frac{\text{Total aset periode awal} + \text{Total aset periode akhir}}{2}$$

Return on Asset (ROA) = laba yang diperoleh dari rata-rata aset

Net income = laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan pada periode waktu tertentu

Average total asset = rata-rata total aset perusahaan yang dihitung dengan total aset periode awal ditambah total aset periode akhir kemudian dibagi dua.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 *net income* adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan dapat mengalir ke entitas. Menurut Sugiono dan Untung

(2016) *ROA* tinggi berarti perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Menurut Maiyaliza *et al.* (2019) Nilai *ROA* dibawah rata-rata bukan merupakan hal yang baik, tetapi tingkat pengembalian atas aset yang rendah tidak berarti buruk, itu diakibatkan oleh keputusan yang disengaja untuk menggunakan utang dalam jumlah besar, beban bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih relatif lebih rendah.

Menurut Kieso *et al.* (2019) aset terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu

1. *Current asset* adalah aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun.
2. *Non current asset* adalah aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Menurut Kieso *et al.* (2018) *current asset* terdiri dari:

1. Persediaan (*Inventory*) adalah barang yang diadakan untuk dijual atau barang yang digunakan dalam produksi untuk dijual.
2. Piutang (*Receivables*) adalah klaim kepada pembeli atau pihak lain atas uang, barang atau jasa.
3. Beban dibayar di muka (*Prepaid expense*) adalah pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat yang akan diterima dalam satu tahun atau siklus operasi. Beban ini digolongkan dalam *current asset* karena apabila beban tersebut belum dibayarkan maka perlu digunakan kas selama tahun berjalan atau tahun berikutnya.
4. Investasi jangka pendek (*Short-term investment*) adalah sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) harus dilaporkan sebagai utang lancar.

5. Kas (*Cash*) adalah aset yang paling likuid dan digunakan sebagai alat pertukaran.

Menurut Kieso *et al.* (2018) *non current asset* terdiri dari:

1. Investasi jangka Panjang (*Long-term investment*), terdiri atas empat jenis, yaitu
 - a. Investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang
 - b. Investasi dalam aktiva tetap berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam aktivitas operasi.
 - c. Investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pensiun atau dana ekspansi pabrik
 - d. Investasi dalam anak perusahaan
2. Properti, pabrik, peralatan (*property, plant, equipment*) adalah aset yang berumur panjang dan bersifat tahan lama yang digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan.
3. Aset tidak berwujud (*Intangible asset*) adalah aset yang tidak termasuk dalam instrumen keuangan karena tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud berupa paten, hak cipta, *franchise*, *goodwill*, merek dagang, dan nama dagang.

2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Menurut Kurniawan (2015) profitabilitas merupakan indikator keberhasilan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Menurut Suparsada dan Putri (2017) dalam

mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, membutuhkan waktu yang cepat karena keharusan untuk menyampaikan kabar baik kepada publik. Menurut Ferdayani *et al.* (2018) Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menuntut auditor untuk melakukan audit tepat waktu sehingga laporan keuangan dapat secepatnya dipublikasikan. Bertujuan untuk menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Menurut Saemargani (2015) perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi cenderung ingin mempublikasikannya karena akan mempertinggi nilai perusahaan di mata pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah kecenderungan yang terjadi adalah kemunduran publikasi laporan keuangan.

Hasil penelitian Suparsada dan Putri (2017) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Saemargani (2015) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Ferdayani *et al.* (2018) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Amani (2016) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian Miradhi dan Juliarsa (2016) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut

H₁ : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

2.8 Ukuran Perusahaan

Menurut Okalesa (2018) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut POJK Nomor 53/POJK.04/2017 terdapat dua jenis emiten berdasarkan total aset:

1. Emiten dengan aset skala kecil yang disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang
 - a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran
 - b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah;
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
2. Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. Memiliki total aset atau istilah lain setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran;

- b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
- 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah;
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan dapat mengalir ke entitas. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan $\ln total\ asset$. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika nilai total aset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan natural log, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Rumus ukuran perusahaan (Suparsada dan Putri, 2017):

$$SIZE = \ln (Total\ Asset)$$

$\ln (Total\ Asset)$ = logaritma natural total aset

$Total\ Assets$ = jumlah total aset yang dimiliki perusahaan

2.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Menurut Amani (2016) perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang baik. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik akan mempermudah auditor sehingga mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan audit. Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) perusahaan dengan skala besar cenderung

memiliki *audit delay* lebih singkat dibandingkan perusahaan kecil, hal ini disebabkan manajemen dengan skala besar memiliki audit internal yang baik untuk mengurangi *audit delay*. Menurut Dewi (2017) pengendalian internal merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Menurut Suparsada dan Putri (2017) semakin besar perusahaan, semakin banyak memiliki sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih serta memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga semakin cepat dalam penyelesaian laporan keuangan.

Menurut penelitian Ningsih dan Widhiyani (2015) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Suparsadan dan putri (2017) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Bahri *et al.* (2017) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut

Haz: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

2.10 Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Suparsada dan Putri, 2017). Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan

mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi (Suparsada dan Putri, 2017). Struktur kepemilikan merupakan porsi-porsi kepemilikan atas suatu perusahaan berdasarkan persentase saham yang dimiliki (Agatha, 2015). Rumus kepemilikan institusional (Suparsada dan Putri, 2017):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional = saham yang dimiliki oleh institusi

Saham yang dimiliki institusi = jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi

Total saham yang beredar = jumlah lembar saham yang dijual kepada publik

Menurut Kieso *et al.* (2019) terdapat 3 jenis saham, yaitu:

1. *Ordinary shares*

Hak-hak yang dimiliki pemegang *ordinary shares*, yaitu:

- a. Memiliki hak *voting* dalam memilih *Board of Directors* dalam pertemuan tahunan dan *voting* dalam setiap kegiatan yang membutuhkan keputusan pemegang saham
- b. Mendapat pembagian laba perusahaan melalui dividen
- c. Memiliki hak untuk tetap mendapatkan persentase kepemilikan yang sama saat penerbitan saham baru
- d. Mendapatkan pembagian aset bila terjadi likuidasi sesuai dengan proporsi yang dipegang oleh pemilik saham. Pemilik saham dibayar dengan aset setelah semua klaim dari kreditor telah dibayarkan

2. *Preference shares*

Pemegang *preference shares* mempunyai prioritas atas distribusi dividen dan aset pada saat likuidasi tetapi pada umumnya tidak memiliki hak *voting*

3. *Treasury shares*

Adalah saham milik perusahaan yang beredar dan dibeli kembali dari pemegang saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham:

- a. Untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham
- b. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut sedang *underpriced*.
- c. Untuk memperoleh tambahan saham yang digunakan untuk akuisisi perusahaan lain
- d. Untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan nilai *earning per share*.

Menurut Kieso *et al.* (2019) *outstanding shares* adalah jumlah saham beredar yang dipertahankan oleh pemegang saham. Menurut Kieso *et al.* (2019) pertimbangan yang dilakukan saat penerbitan saham, yaitu:

1. *Authorized shares*, menunjukkan jumlah saham yang diijinkan untuk dijual
2. *Issuance of shares*, faktor-faktor dalam menentukan harga pada penerbitan saham baru, yaitu:
 - a. Perusahaan mengantisipasi laba masa depan
 - b. Tingkat dividen per saham yang diharapkan
 - c. Posisi keuangan pada saat ini

- d. Keadaan ekonomi pada saat ini
 - e. Kondisi pasar sekuritas pada saat ini
3. *Market price of shares*, secara umum harga per saham ditetapkan mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan
4. *Par and non-par value shares*,
- a. *Par value shares* adalah saham biasa yang mana *charter* telah menetapkan nilai per saham
 - b. *Non-par value shares* adalah saham biasa yang mana belum memberikan nilai

2.11 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Delay*

Menurut Agatha (2015) kepemilikan perusahaan oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan manajemen agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena pihak luar mampu mempengaruhi perusahaan agar dengan cepat mampu menyelesaikan proses auditnya karena kepentingan dari beberapa insitusi terkait. Menurut Lestari (2017) semakin besar kepemilikan oleh institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut Lestari (2017) kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Menurut Diajeng (2016) investor institusional memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Menurut Harnida (2015) *Monitoring* yang dilakukan oleh pihak insitusi lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan *monitoring* yang lebih kuat. Dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat untuk menghindari berkurangnya relevansi dari informasi tersebut. Laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

Menurut penelitian Suparsada dan Putri (2017) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Agatha (2015) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Diajeng (2016) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Jao dan Crismayani (2018) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut

Ha3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

2.12 Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang (Kieso *et al.*, 2019). Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utangnya (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Rasio solvabilitas terdiri dari (Kieso *et al.*, 2019):

a. *Debt to Assets Ratio*

Debt to assets ratio mengukur persentase total aset yang berasal dari kreditur. Rasio tersebut juga mengindikasikan kemampuan keberlangsungan perusahaan dalam membayar bunga kepada kreditur walaupun sedang mengalami kerugian.

b. *Times Interest Earned*

Time interest earned memberikan indikasi atas kemampuan perusahaan membayar bunga saat jatuh tempo.

Pengukuran solvabilitas pada penelitian ini menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Rumus *Debt to Assets Ratio (DAR)* (Ningsih dan Widhiyani, 2019):

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Debt to Assets Ratio = Rata-rata utang yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan aset perusahaan

Total Debt = Total utang yang dimiliki oleh perusahaan

Total Asset = Total aset yang dimiliki oleh perusahaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya

entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Kieso *et al.* (2019) terdapat dua jenis liabilitas, yaitu:

1. Kewajiban lancar (*current liabilities*) adalah kewajiban lancar yang memiliki 2 karakteristik, yaitu:
 - a. Perusahaan memperkirakan untuk membayar utang dari aset yang dimiliki atau timbulnya kewajiban lancar lainnya
 - b. Perusahaan membayar utang dalam periode satu tahun atau siklus operasional

Kewajiban lancar meliputi utang usaha, pendapatan dibayar dimuka, utang pajak, utang gaji, utang bunga.

2. Kewajiban tidak lancar (*non-current liabilities*) adalah pengeluaran sumber daya sebagai akibat dari kewajiban saat ini yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi mana yang lebih pendek. Kewajiban tidak lancar meliputi utang obligasi, utang wesel, dan utang *mortgage*.

Menurut Zulkaenaen (2018) semakin tinggi rasio *debt to total asset (DAR)* berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Siregar (2017) penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kategori *extremely average* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Menurut Hendri (2015) semakin rendah *debt to total asset* maka akan meningkatkan laba sehingga semakin besar jaminan kreditor untuk pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan.

2.13 Pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*

Menurut Okalesa (2018) solvabilitas yang tinggi menggambarkan keadaan perusahaan yang kurang baik dan meningkatkan fokus auditor bahwa laporan keuangan kurang reliabel. Fokus auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses audit karena harus mengumpulkan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangan. Menurut Adiraya dan Sayidah (2018) tingginya solvabilitas mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Tingginya risiko mencerminkan kesulitan keuangan sehingga akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh karena itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Menurut Efendi (2018) rasio utang yang tinggi terhadap total aset dapat berdampak pada kurangnya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Tingginya solvabilitas dapat berakibat auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan pekerjaan audit sehingga berdampak pada *audit delay*.

Menurut penelitian Ningsih dan Widhiyani (2015) solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Okalesa (2018) menyimpulkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Agustin *et al.* (2018) menyimpulkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut

Ha4: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.14 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 3
Model Penelitian

